

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah mengenai "berlian konflik" (*blood diamonds*) berakar kuat pada dekade 1990-an, sebuah periode di mana komoditas berlian kasar bertransformasi menjadi instrumen finansial utama bagi berbagai kelompok pemberontak. Di negara-negara seperti Angola, Sierra Leone, dan Liberia, penguasaan atas ladang berlian memungkinkan aktor non-negara untuk mendanai perang saudara yang destruktif (Le Billon, 2008). Berlian, karena ukurannya yang kecil namun bernilai tinggi, menjadi aset yang sangat likuid dan mudah diselundupkan untuk ditukar dengan persenjataan ilegal.

Eksplorasi sumber daya alam bernilai tinggi tersebut memungkinkan kelompok-kelompok pemberontak mempertahankan konflik bersenjata yang berkepanjangan melawan pemerintah yang sah (Lujala, 2009). Dalam konteks ini, berlian tidak lagi sekadar dipandang sebagai komoditas ekonomi yang berkontribusi pada devisa negara, melainkan berubah menjadi instrumen politik dan militer. Hal ini menciptakan sebuah paradoks sumber daya, di mana kekayaan alam justru memperpanjang siklus kekerasan dan ketidakstabilan di kawasan Afrika Sub-Sahara.

Dampak kemanusiaan yang masif dari konflik yang dibiayai melalui perdagangan berlian tersebut kemudian memicu kemarahan masyarakat internasional. Hubungan erat antara perdagangan permata dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat mulai mendapat sorotan global yang intens. Hal ini diperparah setelah berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) mengungkap fakta bahwa berlian dari zona konflik berhasil menyusup ke dalam pasar perhiasan legal di negara-negara Barat tanpa terdeteksi (Smillie, 2010).

Tekanan internasional dari konsumen dan aktivis inilah yang melatarbelakangi lahirnya Kimberley Process Certification Scheme (KPCS). Sebagai upaya kolektif global, komunitas internasional mengadakan pertemuan di Kimberley, Afrika Selatan, pada tahun 2000 untuk merancang mekanisme pencegahan (Haufler, 2009). KPCS dibentuk sebagai skema sertifikasi internasional yang mewajibkan setiap pengiriman berlian kasar disertai dengan sertifikat yang menjamin bahwa komoditas tersebut tidak digunakan untuk mendanai kelompok pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintah.

Secara normatif, KPCS bertujuan memutus rantai pendanaan konflik melalui sistem pengawasan dan sertifikasi yang ketat yang mengatur arus ekspor-impor antarnegara (Grant & Taylor, 2004). Namun, rezim ini memiliki kelemahan konseptual yang fundamental sejak awal pembentukannya. Definisi resmi conflict diamonds dalam protokol KPCS secara eksplisit dibatasi hanya pada berlian yang digunakan oleh kelompok pemberontak.

Keterbatasan ini menciptakan celah struktural yang signifikan dalam desain rezim. Definisi tersebut sama sekali tidak mencakup atau menjangkau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan negara, tentara reguler, atau aktor-aktor yang berafiliasi dengan pemerintah yang sah. Akibatnya, rezim ini seringkali dianggap hanya sebagai alat untuk melindungi kedaulatan negara tanpa mempertimbangkan perilaku etis negara tersebut terhadap warga negaranya sendiri di area pertambangan.

Implementasi KPCS di berbagai negara produsen menunjukkan dinamika yang beragam, namun Zimbabwe muncul sebagai kasus yang paling kontroversial (Maringira & Masiya, 2016). Fokus utama perdebatan berpusat di wilayah Marange, Chiadzwa, yang memiliki cadangan berlian aluvial raksasa. Penemuan deposit ini pada tahun 2006 justru diikuti oleh periode ketidakstabilan dan kekerasan sistematis.

Wilayah Marange memiliki sejarah yang kompleks terkait tata kelola dan dugaan pelanggaran HAM berat (Martin, 2012). Berbagai laporan internasional mendokumentasikan adanya keterlibatan aktif aparat keamanan dalam pengelolaan tambang serta praktik kekerasan, kerja paksa, dan pengusiran paksa terhadap masyarakat lokal (Ndlovu, 2017) bukti-bukti kekerasan ini nyata, Zimbabwe secara teknis seringkali tetap dianggap "patuh" oleh KPCS karena pelaku kekerasannya adalah aktor negara, bukan kelompok pemberontak.

Penelitian pada periode 2019–2024 menjadi sangat krusial karena masa ini menandai fase reformasi kebijakan besar-besaran di industri berlian Zimbabwe. Pemerintah Zimbabwe berupaya memperbaiki citra internasionalnya melalui penerapan Zimbabwe National Diamond Policy (2019) yang bertujuan memperkuat akuntabilitas dan memusatkan aktivitas pertambangan pada entitas terverifikasi, seperti Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) (Maguwu, 2022). Langkah ini diklaim sebagai upaya untuk menertibkan sektor pertambangan dan mematuhi standar internasional secara administratif.

Puncak dari pengakuan internasional terhadap reformasi ini tercermin ketika Zimbabwe dipercaya menjabat sebagai Ketua Kimberley Process pada tahun 2023. Namun, di balik pencapaian administratif tersebut, efektivitas nyata dari kebijakan ini masih diperdebatkan. Laporan terkini mencatat masih adanya tantangan besar dalam sinkronisasi pengawasan, transparansi rantai pasok, serta efektivitas koordinasi antar-lembaga (Kanyepe, 2023; Rasul, 2024). Muncul kekhawatiran bahwa kepatuhan administratif di tingkat kebijakan tidak serta-merta menghentikan praktik eksploitasi di tingkat lokal.

Melihat dinamika yang terjadi pada periode 2019–2024, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi sejauh mana KPCS benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembatas perdagangan berlian konflik di tengah reformasi kebijakan yang dilakukan Zimbabwe. Dengan mempertimbangkan celah definisi "berlian konflik" yang ada, penelitian ini

akan meninjau apakah kepatuhan Zimbabwe terhadap protokol KPCS telah memberikan dampak substantif bagi perbaikan industri berlian mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) dalam membatasi perdagangan berlian konflik di Zimbabwe pada periode 2019–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana implementasi Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) efektif dalam membatasi perdagangan berlian konflik di Zimbabwe selama periode 2019–2024. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan suatu rezim internasional dengan mengevaluasi sejauh mana standar normatif global dapat diinternalisasi ke dalam kebijakan domestik negara produsen yang sedang mengalami transformasi tata kelola (Young, 2011). Fokus utama analisis diarahkan pada penilaian terhadap konsistensi antara kepatuhan administratif pemerintah Zimbabwe seperti pemberlakuan Zimbabwe National Diamond Policy (2019) dengan perubahan nyata pada pola perilaku aktor-aktor di lapangan serta dampak substantifnya terhadap penyelesaian akar konflik di wilayah pertambangan (Maguwu, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan pencapaian formal Zimbabwe dalam keanggotaan KPCS, tetapi juga untuk mengidentifikasi

hambatan institusional yang membatasi kapasitas rezim internasional dalam memberikan solusi nyata terhadap persoalan hak asasi manusia dan transparansi. Gambaran umum mengenai efektivitas implementasi ini nantinya akan menjadi fondasi untuk membedah derajat keberhasilan rezim secara lebih sistematis melalui variabel-variabel evaluasi yang akan dipaparkan secara mendalam pada bab berikutnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rezim internasional di Zimbabwe dengan memposisikan karakteristik instrumen KPCS sebagai variabel bebas, yang ditinjau melalui dimensi *problem malignancy* (tingkat kompleksitas isu) dan *problem-solving capacity* (kapasitas mekanisme penyelesaian masalah). Analisis ini diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel tersebut memengaruhi variabel terikat, yakni efektivitas rezim yang dipetakan secara sistematis dalam tiga tingkatan capaian, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact* (Underdal, 2002). Dalam kerangka ini, penelitian juga menempatkan level kolaborasi antara otoritas nasional dan pemangku kepentingan internasional sebagai variabel intervensi yang menjadi faktor penentu dalam mengonversi kapasitas penyelesaian masalah menjadi hasil yang berkelanjutan bagi pembangunan nasional di Zimbabwe (Miles et al., 2002).

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam studi mengenai rezim internasional dan efektivitas kebijakan global dalam menanggulangi perdagangan berlian ilegal. Dengan menggunakan Teori Efektivitas Rezim, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi tingkat kepatuhan administratif suatu negara terhadap rezim internasional, tetapi juga menguji sejauh mana desain normatif rezim tersebut mampu menghasilkan dampak substantif terhadap permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskusi akademik mengenai efektivitas regulasi internasional dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pada level *output* tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku (*outcome*) maupun penyelesaian masalah secara substantif (*impact*) (Young, 2011). Dalam konteks ini, studi ini memberikan perspektif kritis terhadap dinamika implementasi Kimberley Process Certification Scheme (KPCS), khususnya dengan menyoroti bagaimana keterbatasan definisi *conflict diamonds* berimplikasi pada terbatasnya kapasitas rezim dalam merespons bentuk kekerasan yang melibatkan aktor negara.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur mengenai efektivitas rezim internasional, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual terkait pentingnya kesesuaian antara desain normatif rezim dan kompleksitas empiris di lapangan. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik pada isu perdagangan berlian, mekanisme sertifikasi internasional, serta dinamika tata kelola global di negara berkembang (Bieri, 2010).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kelemahan struktural dan capaian administratif dalam implementasi Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) di Zimbabwe. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan, organisasi internasional, serta pemangku kepentingan industri berlian dalam menilai apakah mekanisme sertifikasi yang ada benar-benar mampu menjawab kompleksitas permasalahan di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan struktural.

Selain itu, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat internasional mengenai keterbatasan pendekatan regulatif yang hanya berfokus pada pendanaan kelompok pemberontak, tanpa secara eksplisit menjangkau pelanggaran yang melibatkan aktor negara (Smillie, 2010). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Zimbabwe dan aktor internasional dalam memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi rantai pasok, serta mempertimbangkan penyempurnaan definisi dan mandat KPCS agar lebih

responsif terhadap dinamika konflik kontemporer (*KP Chairs Strategic Meeting, 12-13 January 2023, 2023*).

1.5 Kerangka Pemikiran Teori

1.5.1 Literature Review

Dalam menganalisis efektivitas Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) di Zimbabwe, berbagai studi terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memetakan bagaimana mekanisme sertifikasi ini beroperasi untuk menekan perdagangan berlian konflik. Sejumlah penelitian mengevaluasi efektivitas KPCS secara global serta tantangan implementasinya di tingkat nasional melalui berbagai sudut pandang. Organisasi Partnership Africa Canada (2010) dalam laporannya menyoroti bahwa meskipun KPCS secara teknis membantu mengurangi volume perdagangan berlian konflik di pasar dunia, masih terdapat kelemahan fundamental dalam mekanisme pemantauan di tingkat domestik. Pandangan ini diperkuat oleh Rasul (2024) yang menggunakan pendekatan evaluasi regulasi internasional untuk menunjukkan bahwa KPCS menghadapi hambatan besar dalam memastikan kepatuhan negara anggota serta menangani taktik penyelundupan yang kian canggih. Selain itu, Munemo (2013) memberikan perspektif berbeda dengan menekankan bahwa efektivitas KPCS bervariasi secara signifikan antarnegara; jika di beberapa kawasan skema ini menunjukkan perkembangan, Zimbabwe justru menjadi anomali karena korupsi sistematis dan dinamika politik domestik yang menghambat kinerja rezim tersebut secara struktural.

Fokus penelitian kemudian mengerucut pada implementasi spesifik di Zimbabwe, terutama pasca-terungkapnya pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Marange. Ndlovu (2017) menggunakan sudut pandang tata kelola keamanan untuk menunjukkan bahwa meskipun Zimbabwe secara formal mematuhi skema KPCS, lemahnya regulasi nasional dan minimnya transparansi membuat sistem ini gagal berfungsi sebagai instrumen pengawas. Sementara itu, Maringira dan Masiya (2016) melalui pendekatan sosiologi-politik mengungkapkan bahwa aparat keamanan Zimbabwe justru terlibat aktif dalam eksploitasi dan penyelundupan berlian ilegal melalui jaringan pasar gelap. Temuan tersebut selaras dengan laporan KP Monitoring Team (2012) yang menegaskan adanya ketidakpatuhan terhadap standar sertifikasi akibat keterlibatan aktor negara dalam aktivitas tambang non-prosedural. Lebih lanjut, Kanyepe (2023) dalam kajian manajemen rantai pasok menyoroti bahwa kerentanan distribusi berlian di Zimbabwe terhadap praktik penyelundupan menjadi faktor utama yang memandulkan efektivitas sertifikasi KPCS di tingkat lokal.

Berbagai tantangan sistemik lainnya juga diidentifikasi sebagai penghambat efektivitas rezim ini. Katsaura (2010) melalui sudut pandang ekonomi-politik menyoroti eksploitasi pekerja tambang dan kekerasan aparat yang terus berlangsung di luar jalur resmi meskipun sertifikat kepatuhan telah diterbitkan. Dari sisi partisipasi publik, Mupfumi (2017) menekankan bahwa absennya peran masyarakat sipil dalam pengawasan menyebabkan akuntabilitas pemerintah dalam menegakkan standar KPCS menjadi sangat rendah. Hal ini sejalan dengan argumen Haufler (2009) yang

mengidentifikasi celah pada mandat internasional; keterbatasan KPCS dalam melakukan intervensi terhadap kedaulatan negara menyebabkan sanksi internasional seringkali tidak mampu menjangkau praktik ilegal yang terorganisir di tingkat domestik. Persamaan dari keseluruhan literatur tersebut terletak pada pengakuan bahwa terdapat kesenjangan antara status formal keanggotaan Zimbabwe dalam KPCS dengan realitas praktik di lapangan. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus periodisasi dan kerangka analisis yang digunakan, di mana mayoritas studi terdahulu lebih banyak menekankan pada aspek sosiologis, keamanan, dan ekonomi politik tanpa melakukan evaluasi sistematis terhadap kapasitas penyelesaian masalah rezim internasional.

State of the art atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya untuk mengisi celah teoretis dan temporal yang belum tersentuh oleh kajian-kajian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian Ndlovu (2017) atau Kanyepe (2023) yang berfokus pada teknis regulasi dan manajemen, penelitian ini secara eksplisit menggunakan kerangka Teori Efektivitas Rezim dari Arild Underdal untuk mengukur derajat keberhasilan KPCS melalui tiga level evaluasi: *output*, *outcome*, dan *impact*. Secara temporal, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memfokuskan analisis pada periode 2019–2024, sebuah fase krusial yang ditandai dengan diterbitkannya Zimbabwe National Diamond Policy (2019) serta momentum diplomasi saat Zimbabwe menjabat sebagai Ketua KPCS pada tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini memposisikan diri sebagai kajian kontemporer yang mengevaluasi apakah pengakuan administratif

internasional terhadap Zimbabwe pada periode reformasi terbaru ini benar-benar mencerminkan efektivitas rezim dalam mengubah perilaku aktor dan menyelesaikan akar permasalahan konflik secara substantif.

1.5.2 Efektivitas Rezim

Arild Underdal (1992, 2002) mengonseptualisasikan efektivitas rezim sebagai sejauh mana sebuah institusi internasional mampu memecahkan permasalahan kolektif yang mendasari pembentukannya. Keberhasilan suatu rezim tidak hanya dilihat dari pembentukan kerja sama formal saja, tetapi dari kapasitas fungsionalnya dalam mentransformasi perilaku aktor agar selaras dengan tujuan rezim. Secara teoretis, Underdal mengukur derajat efektivitas ini melalui rasio pencapaian antara kinerja aktual (*actual performance*) dengan kondisi ideal yang diharapkan (*collective optimum*), yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Effectiveness = \frac{AP - NR}{CO - NR}$$

Dalam membedah dinamika tersebut, Underdal mengoperasionalkan analisisnya melalui tiga variabel utama yang saling berinteraksi. Pertama, variabel terikat (*dependent variable*) merupakan tingkat efektivitas itu sendiri yang diukur melalui tiga indikator keberhasilan yaitu *output* (pembentukan regulasi nasional), *outcome* (perubahan perilaku nyata dari aktor yang terlibat), dan *impact* (perbaikan kondisi faktual atas masalah yang dihadapi). Kedua, variabel bebas (*independent variable*) yang menentukan potensi efektivitas, mencakup *problem malignancy* (tingkat

kerumitan dan sifat konflik dari isu yang ditangani) serta *problem-solving capacity* (kapasitas instrumen dan kekuatan pengaturan yang dimiliki rezim). Ketiga, variabel intervensi (*intervening variable*) yang berperan sebagai mediator proses politik, yakni level kolaborasi dan dinamika institusional yang menentukan seberapa efisien kapasitas penyelesaian masalah tersebut dapat dikonversi menjadi hasil nyata pada tingkat domestik maupun internasional (Underdal, 1992, 2002).

1.5.2.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat dalam kerangka Teori Efektivitas Rezim Arild Underdal difokuskan pada tiga komponen evaluasi utama, yakni *output*, *outcome*, dan *impact*. Komponen *output* merujuk pada kebijakan, program, serta regulasi yang ditetapkan untuk mengoperasionalkan ketentuan rezim. Underdal membagi *output* ke dalam dua tingkatan: Level 1, yang tercapai melalui peresmian perjanjian tertulis oleh para pihak, dan Level 2, yang terwujud saat negara anggota melakukan langkah-langkah implementasi domestik seperti pembentukan kebijakan nasional yang selaras dengan nilai rezim (Underdal, 2002).

Selanjutnya, *outcome* diukur melalui perubahan perilaku (*behavioral change*) dari subjek rezim sebagai konsekuensi dari ketentuan yang berlaku, di mana efektivitas dinilai positif apabila perubahan tersebut sinkron dengan tujuan awal pembentukan rezim (Young, 2011). Terakhir, *impact* merupakan hasil akhir yang mencerminkan tingkat keberhasilan rezim dalam mencapai kondisi teknis optimal (*technical optimum*) atau

penyelesaian masalah yang dituju. Secara komprehensif, variabel terikat ini menyimpulkan bahwa sebuah rezim dikategorikan efektif apabila ketiga komponen tersebut menunjukkan indikator positif yang saling berkesinambungan. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara hasil aktual dengan tujuan awal pada ketiga aspek tersebut akan mengindikasikan rendahnya efektivitas rezim tersebut (Miles et al., 2002).

1.5.2.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Arild Underdal menjelaskan bahwa variabel bebas dalam analisis efektivitas rezim terdiri dari dua dimensi fundamental, yaitu *problem malignancy* (tipe permasalahan) dan *problem-solving capacity* (kapasitas penyelesaian masalah). *Problem malignancy* merujuk pada sifat dasar dari isu yang ditangani, yang dikategorikan menjadi dua jenis: *benign* (permasalahan yang cenderung mudah diselesaikan karena adanya keselarasan kepentingan) dan *malign* (permasalahan kompleks yang melibatkan konflik kepentingan yang tajam) (Underdal, 2002).

Di sisi lain, *problem-solving capacity* merepresentasikan kekuatan instrumen institusional dan kapabilitas rezim dalam merumuskan serta menegakkan solusi. Kedua dimensi variabel bebas ini secara signifikan memengaruhi tingkat kolaborasi yang terbentuk (variabel intervensi), yang pada akhirnya menentukan probabilitas pencapaian efektivitas rezim secara positif (Miles et al., 2002). Dalam konteks isu yang bersifat *malign*, diperlukan *problem-solving capacity* yang jauh lebih kuat untuk mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan (Young, 2011).

Tabel 1.1 Karakteristik Tipe Permasalahan

<i>Malign</i>	<i>Benign</i>
<i>Incongruity</i> <i>Asymmetry</i> <i>Cummulative Cleavages</i>	<i>Coordination</i> <i>Symmetry</i> <i>Cross-cutting Cleavages</i>

Sumber: Underdal, *One Question, Two Answers*, 2002

Dalam klasifikasinya, Underdal (2002) membedakan tipe permasalahan (*problem malignancy*) ke dalam dua kategori utama, yaitu *benign* dan *malign*. Permasalahan bersifat *benign* ditandai dengan adanya keselarasan kepentingan antar aktor yang didukung oleh tiga karakteristik: koordinasi yang harmonis, simetri nilai antaraktor yang saling terkait, serta *cross-cutting cleavages* yang menyederhanakan penyelesaian masalah melalui kesamaan visi. Sebaliknya, tipe *malign* merepresentasikan permasalahan kompleks yang menuntut upaya lebih besar dari rezim akibat adanya inkongruensi atau ketidaksesuaian pandangan terhadap isu utama. Kondisi *malign* ini dapat diidentifikasi melalui asimetri kepentingan nasional serta *cumulative cleavage*, yaitu perbedaan mendalam yang berpotensi memicu perpecahan dalam struktur rezim (Underdal, 2002). Ketidakmampuan rezim dalam menjembatani *cumulative cleavage* ini sering kali menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan negara anggota (Miles et al., 2002).

Selanjutnya, dimensi kedua dari variabel bebas adalah *problem-solving capacity* yang mengukur kapabilitas rezim melalui tiga indikator utama. Pertama, *institutional setting* yang mencakup kerangka aturan, di mana institusi berfungsi sebagai arena berlangsungnya proses

politik dan organisasi tertentu berperan sebagai aktor kunci. Kedua, *distribution of power* yang menekankan pada pembagian kekuasaan secara adil, di mana kepemimpinan tidak bersifat absolut dan terdapat mekanisme kontrol terhadap dominasi pihak tertentu (Underdal, 2002). Ketiga, *skill and energy* yang merujuk pada kompetensi serta kapasitas sumber daya dalam merumuskan solusi; di mana ketersediaan keterampilan dan energi yang memadai akan meningkatkan probabilitas efektivitas rezim secara signifikan (Miles et al., 2002). Ketiga indikator ini secara kolektif menentukan apakah sebuah rezim memiliki instrumen yang cukup kuat untuk mengatasi permasalahan yang bersifat *malign* (Young, 2011).

1.5.2.3 Variabel Intervensi (*Intervening Variable*)

Variabel intervensi merupakan elemen yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan secara langsung memengaruhi variabel terikat dalam menentukan efektivitas suatu rezim. Dalam kerangka ini, variabel intervensi merujuk pada tingkat kolaborasi (*level of collaboration*) yang tercipta dalam operasional rezim. Kedalaman kolaborasi ini sangat bergantung pada interaksi antara kompleksitas masalah (*problem malignancy*) dan kapasitas penyelesaian masalah (*problem-solving capacity*) (Underdal, 2002). Underdal membedakan tingkat kolaborasi tersebut ke dalam enam level sebagai berikut (Miles et al., 2002):

1. Level 0: Terbatas pada adanya gagasan atau visi bersama di antara para aktor, namun tanpa dibarengi tindakan kolektif yang terkoordinasi.

2. Level 1: Terdapat koordinasi tindakan yang dilakukan secara implisit atau diam-diam (*tacit coordination*).
3. Level 2: Koordinasi tindakan didasarkan pada kerangka hukum yang eksplisit, namun implementasi sepenuhnya menjadi diskresi pemerintah negara anggota tanpa adanya penilaian efektivitas yang terpusat.
4. Level 3: Koordinasi tindakan didasarkan pada hukum yang jelas dan implementasi dilakukan oleh negara anggota, namun sudah terdapat mekanisme penilaian terpusat terhadap efektivitas kebijakan tersebut.
5. Level 4: Adanya koordinasi terencana yang dikombinasikan dengan implementasi di tingkat domestik serta didukung oleh evaluasi efektivitas yang sistematis.
6. Level 5: Merupakan tingkat tertinggi, di mana terdapat integrasi menyeluruh mulai dari perencanaan hingga implementasi dan penilaian efektivitas yang dilakukan secara terpusat oleh rezim.

Berdasarkan klasifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel ini membentuk sebuah rantai kausalitas yang saling berkaitan. Variabel bebas (*problem malignancy* dan *problem-solving capacity*) menjadi determinan utama yang menentukan kualitas variabel intervensi (*level of collaboration*). Selanjutnya, kualitas kolaborasi tersebut akan menentukan capaian pada variabel terikat, yang diperlakukan sebagai rangkaian sebab-akibat dalam tiga tahapan efektivitas, yakni *output*

(regulasi), *outcome* (perubahan perilaku), dan *impact* (dampak nyata di lapangan) (Underdal, 2002). Dengan demikian, efektivitas rezim merupakan produk akhir dari interaksi sistematis antar-variabel tersebut dalam merespons isu internasional yang ditangani (Miles et al., 2002).

1.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini mengintegrasikan beberapa elemen kunci guna menganalisis efektivitas Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) di Zimbabwe melalui kerangka pemikiran Arild Underdal. Pertama, rezim internasional dipahami sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang disepakati oleh aktor negara untuk mengatur isu spesifik dalam hubungan internasional (Krasner, 1983). Dalam konteks penelitian ini, KPCS diposisikan sebagai instrumen kerja sama internasional yang berpusat pada negara sebagai aktor utama, dengan orientasi normatif pada pengendalian perdagangan berlian konflik (Young, 1989). Namun, sebagai rezim berbasis negara, desain dan cakupan mandatnya sangat dipengaruhi oleh konsensus politik antaranggota, yang berimplikasi pada batasan definisional dalam menentukan apa yang dikategorikan sebagai *conflict diamonds*.

Kedua, potensi keberhasilan rezim tersebut dipengaruhi oleh variabel independen yang mencakup *problem malignancy* dan *problem-solving capacity*. *Problem malignancy* digunakan untuk menilai tingkat kompleksitas isu berlian di Zimbabwe yang bersifat *malign* akibat asimetri

kepentingan antara elite politik-militer domestik dan norma internasional, serta adanya *cumulative cleavages* dalam struktur kekuasaan. Sementara itu, *problem-solving capacity* digunakan untuk mengukur kekuatan instrumen KPCS dalam menyediakan solusi melalui pengaturan kelembagaan, mekanisme pemantauan, dan sistem sertifikasi. Dalam penelitian ini, dimensi tersebut juga mencakup evaluasi terhadap keterbatasan mandat normatif rezim yang membatasi ruang intervensinya terhadap pelanggaran yang melibatkan aktor negara.

Ketiga, terdapat *intervening variable* berupa tingkat kolaborasi yang merujuk pada kerangka Underdal (2002). Fokus analisis diarahkan pada posisi implementasi KPCS di Zimbabwe dalam spektrum Level 3 menuju Level 4, di mana kolaborasi tidak hanya diukur dari keberadaan kerangka hukum dan mekanisme evaluasi, tetapi juga dari sejauh mana koordinasi tersebut mampu menghasilkan perubahan substantif di tingkat domestik. Dalam konteks ini, stagnasi pada level kolaborasi administratif menjadi indikator penting dalam memahami keterbatasan konversi kapasitas rezim menjadi hasil nyata.

Terakhir, sebagai *dependent variable*, efektivitas rezim diukur secara komprehensif melalui tiga tingkatan capaian, yaitu *output* yang merepresentasikan hasil formal seperti kebijakan domestik Zimbabwe National Diamond Policy 2019, *outcome* yang mencerminkan perubahan perilaku (*behavioral change*) aktor domestik, serta *impact* sebagai evaluasi akhir terhadap dampak nyata pada stabilitas tata kelola dan penurunan praktik perdagangan berlian ilegal di Zimbabwe (Underdal, 2002). Analisis

tidak hanya menilai keberadaan regulasi formal, tetapi juga menguji kesesuaian antara desain normatif rezim dan kompleksitas empiris di lapangan. Keseluruhan variabel ini membentuk satu kesatuan analisis untuk menjawab sejauh mana dan mengapa KPCS belum sepenuhnya mampu menghasilkan efektivitas substantif dalam tata kelola sumber daya berlian di Zimbabwe (Miles et al., 2002).

1.6.2 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, efektivitas rezim internasional dioperasionalkan melalui interaksi tiga variabel utama yang dikemukakan oleh Underdal (2002), yang disesuaikan secara spesifik untuk menjawab mengapa implementasi Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) di Zimbabwe pada periode 2019–2024 belum mencapai efektivitas substantif. Variabel dependen diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*. Dimensi *output* merujuk pada tingkat kepatuhan administratif terhadap norma KPCS, yang diukur melalui penerbitan kebijakan domestik seperti Zimbabwe National Diamond Policy 2019, penguatan institusi pengawasan resmi, prosedur sertifikasi ekspor-impor berlian, serta partisipasi Zimbabwe dalam mekanisme peer review KPCS. Pada tahap ini, efektivitas dinilai berdasarkan keselarasan formal antara regulasi nasional dan standar rezim internasional.

Dimensi *outcome* mencerminkan perubahan perilaku (*behavioral change*) aktor domestik setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Indikatornya mencakup tingkat kepatuhan aparat pemerintah, aparat

keamanan, dan pelaku industri seperti Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) terhadap sistem sertifikasi, konsistensi pelaporan statistik ekspor-impor, serta peningkatan transparansi dalam rantai pasok berlian di wilayah Marange. Sementara itu, dimensi *impact* mengukur dampak substantif terhadap penyelesaian masalah yang menjadi dasar pembentukan rezim, yang dioperasionalkan melalui analisis tren perdagangan berlian ilegal, legitimasi berlian Zimbabwe di pasar internasional, serta dinamika laporan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pertambangan. Melalui tiga dimensi ini, penelitian menguji apakah capaian administratif (*output*) benar-benar terkonversi menjadi perubahan perilaku (*outcome*) dan dampak nyata (*impact*), sebagaimana dirumuskan dalam kerangka efektivitas rezim oleh Underdal (2002).

Selanjutnya, variabel independen digunakan untuk menjelaskan penyebab rendahnya efektivitas tersebut melalui dimensi *problem malignancy* dan *problem-solving capacity*. *Problem malignancy* dioperasionalkan sebagai tingkat kompleksitas dan konflik kepentingan dalam isu berlian di Zimbabwe, yang ditandai oleh asimetri kepentingan antara elite politik-militer domestik dan norma internasional, serta adanya keterlibatan aktor negara dalam praktik eksploitasi tambang dan penyelundupan. Sementara itu, *problem-solving capacity* dioperasionalkan sebagai kapasitas kelembagaan dan normatif KPCS dalam menyediakan solusi, yang diukur melalui kekuatan mekanisme pemantauan, efektivitas sistem sanksi, kewenangan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, serta ruang lingkup definisi *conflict diamonds* yang menentukan batas intervensi

rezim. Dalam penelitian ini, keterbatasan definisi yang hanya mencakup pendanaan kelompok pemberontak dianalisis sebagai faktor yang membatasi kemampuan rezim untuk merespons kekerasan yang melibatkan aktor negara.

Adapun variabel intervensi berupa tingkat kolaborasi dioperasionalkan berdasarkan klasifikasi Underdal (2002), dengan fokus pada posisi implementasi KPCS di Zimbabwe dalam spektrum Level 3 hingga Level 4. Analisis diarahkan pada sejauh mana interaksi antara KPCS dan pemerintah Zimbabwe mampu melampaui koordinasi hukum formal menuju integrasi kebijakan yang substantif di tingkat domestik. Secara keseluruhan, operasionalisasi variabel ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara regulasi formal yang dihasilkan (*output*) dengan realitas perubahan perilaku dan dampak substantif di lapangan (*outcome* dan *impact*), yang pada akhirnya menjelaskan alasan di balik belum tercapainya efektivitas substantif implementasi KPCS di Zimbabwe pada periode 2019–2024 (Underdal, 2002; Miles et al., 2002).

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa meskipun implementasi Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) di Zimbabwe periode 2019–2024 menunjukkan capaian pada tingkat output dan kepatuhan administratif, efektivitas substantifnya belum tercapai akibat karakter permasalahan yang bersifat malign serta keterbatasan mandat normatif rezim. Ketidakefektifan

ini berakar pada definisi “berlian konflik” yang terlalu sempit, yakni hanya mencakup berlian yang digunakan oleh kelompok pemberontak untuk menggulingkan pemerintah yang sah, sehingga tidak menjangkau pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan aktor negara di wilayah Marange (Grant, 2012). Pembatasan definisional tersebut menciptakan celah dalam *problem-solving capacity* rezim, karena ruang lingkup intervensinya dibatasi oleh kerangka konseptual yang tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan dinamika kekerasan kontemporer dalam industri berlian.

Dalam kerangka Teori Efektivitas Rezim, kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat *problem malignancy*, yang ditandai oleh asimetri kepentingan antara elite politik-militer domestik dan norma internasional, serta adanya *cumulative cleavages* yang memperumit konversi kebijakan menjadi hasil nyata (Underdal, 2002). Keterbatasan mandat tersebut memungkinkan aktor domestik memanfaatkan celah normatif untuk tetap mempertahankan praktik eksploitatif tanpa secara formal melanggar ketentuan KPCS. Akibatnya, pada variabel dependen terjadi diskoneksi antara *output* formal seperti Zimbabwe National Diamond Policy 2019 dengan *outcome* di lapangan, di mana kebijakan yang selaras secara administratif dengan standar rezim tidak secara signifikan mengubah perilaku aktor domestik maupun mengurangi kekerasan struktural.

Variabel intervensi menunjukkan bahwa tingkat kolaborasi antara KPCS dan pemerintah Zimbabwe cenderung stagnan pada koordinasi legalistik atau Level 3, tanpa mencapai integrasi kebijakan substantif pada

Level 4 yang memungkinkan evaluasi dan koreksi sistemik secara menyeluruh (Underdal, 2002). Dengan demikian, ketidakefektifan KPCS di Zimbabwe bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya implementasi domestik, melainkan merupakan konsekuensi dari keterbatasan desain normatif rezim yang membatasi kapasitasnya dalam mengonversi kepatuhan formal menjadi dampak substantif. Dalam perspektif efektivitas rezim, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan administratif tidak otomatis menghasilkan penyelesaian masalah secara struktural, terutama ketika kerangka konseptual rezim tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kompleksitas empiris yang dihadapi (Miles et al., 2002).

1.8 Metode Penelitian

Sebuah penulisan ilmiah dapat dianggap valid apabila menerapkan metode penelitian selama proses pengerjaan. Metode penelitian berfungsi sebagai cara atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data, dengan tujuan untuk menemukan informasi baru serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik (Sugiyono, 2017).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi fenomena ketidakefektifan Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) di Zimbabwe secara mendalam, dengan menitikberatkan pada interpretasi data terhadap realitas di lapangan periode 2019–2024. Melalui metode ini, peneliti dapat melakukan proses induksi untuk memahami bagaimana variabel *problem malignancy* dan keterbatasan definisi berlian

konflik memengaruhi pencapaian *output*, *outcome*, dan *impact* dalam kerangka kerja Underdal (2002).

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada analisis data non-numerik, seperti teks, video, atau audio, yang dikelola untuk menggali wawasan mendalam mengenai suatu konsep, isu, teori, atau masalah. Tujuannya adalah untuk menemukan gagasan-gagasan baru serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial melalui kontekstualisasi hasil penelitian (Bhandari, 2020). Penulis memilih metode ini karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersifat tekstual dan deskriptif, yang menggambarkan dinamika implementasi serta efektivitas Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) di Zimbabwe pada periode 2019–2024. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat membedah secara kritis kebijakan Zimbabwe National Diamond Policy 2019 dan laporan-laporan kualitatif lainnya guna menemukan jawaban atas ketidakefektifan rezim dalam menangani isu berlian konflik di wilayah Marange.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini bersifat non-lapangan (*desk study*), di mana proses analisis dilakukan melalui telaah pustaka terhadap dokumen, laporan, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan implementasi Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) di Zimbabwe. Peneliti

tidak melakukan observasi fisik di lokasi, melainkan memfokuskan kajian pada data-data tekstual yang kredibel. Sumber data utama diambil dari jurnal akademik, laporan organisasi internasional seperti Global Witness dan KP Monitoring Team, serta studi kasus yang berfokus pada sektor pertambangan berlian di wilayah Marange, Zimbabwe. Selain itu, penelitian ini menggunakan dokumen kebijakan nasional dan internasional terkait KPCS sebagai bahan analisis utama guna menjamin validitas informasi yang diolah (Sugiyono, 2017).

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah negara Zimbabwe, yang dianalisis sebagai unit politik dan administratif dalam kapasitasnya sebagai anggota sekaligus pelaksana mandat Kimberley Process Certification Scheme (KPCS). Mengingat penelitian ini menggunakan metode *desk study*, subjek penelitian tidak merujuk pada individu atau narasumber yang diwawancarai secara langsung, melainkan pada representasi perilaku dan kebijakan negara Zimbabwe yang dievaluasi melalui sumber data sekunder. Analisis dilakukan dengan menelaah secara mendalam berbagai dokumen resmi, laporan kebijakan, jurnal akademik, serta publikasi dari organisasi internasional yang merekam dinamika tata kelola berlian di negara tersebut (Bhandari, 2020).

Sebagai subjek penelitian, Zimbabwe dipahami melalui peran aktor-aktor institusional kunci yang membentuk perilaku negara dalam industri ekstraktif. Hal ini meliputi Pemerintah Zimbabwe dan

Kementerian Pertambangan yang bertanggung jawab atas perumusan regulasi nasional, serta aparat keamanan termasuk militer dan kepolisian yang memiliki pengaruh signifikan dalam praktik di lapangan, terutama di wilayah Marange (Maringira & Masiya, 2016). Selain itu, entitas bisnis negara seperti Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) turut menjadi bagian dari subjek analisis karena peran sentralnya dalam rantai produksi dan distribusi yang menjadi indikator kepatuhan negara terhadap standar internasional.

Kajian terhadap Zimbabwe juga melibatkan analisis terhadap laporan dari lembaga internasional seperti Kimberley Process Monitoring Team serta data dari organisasi masyarakat sipil yang aktif memantau isu hak asasi manusia dan transparansi di sana (Kimberley Process Monitoring Team, 2012). Data dari lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai cermin untuk melihat bagaimana Zimbabwe merespons tekanan internasional dan mengimplementasikan standar KPCS secara objektif. Penggunaan laporan pihak ketiga ini memungkinkan peneliti melakukan validasi melalui teknik triangulasi sumber, sehingga gambaran mengenai perilaku subjek tetap akurat dan komprehensif (Sugiyono, 2017).

Dengan demikian, subjek penelitian ini bersifat konseptual dan direpresentasikan melalui narasi serta temuan literatur yang menggambarkan posisi dan dinamika Zimbabwe dalam konteks efektivitas KPCS pada periode 2019–2024. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis terhadap perilaku negara melalui teknik analisis dokumen tanpa keterlibatan langsung dari subjek sebagai

partisipan aktif. Seluruh analisis difokuskan untuk mengukur efektivitas rezim berdasarkan indikator output, outcome, dan impact yang tercermin dari kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Zimbabwe sebagai subjek utama dalam penelitian ini (Underdal, 2002; Bhandari, 2020).

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Data tersebut terdiri dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus studi, antara lain dokumen kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan Kimberley Process Certification Scheme (KPCS); laporan tahunan serta evaluasi dari Kimberley Process dan Kimberley Process Monitoring Team (Kimberley Process Monitoring Team, 2012). Selain itu, peneliti memanfaatkan artikel jurnal ilmiah dan karya akademik yang membahas efektivitas rezim internasional serta pengelolaan berlian konflik, serta laporan investigatif dari organisasi non-pemerintah seperti Global Witness dan Partnership Africa Canada (Smillie, 2010).

Data juga diperoleh melalui teknik wawancara tidak langsung, yang mencakup kutipan pernyataan pejabat publik maupun pelaku industri berlian yang tercantum dalam laporan media kredibel dan literatur akademik. Seluruh data tersebut digunakan untuk mendukung analisis mendalam terhadap variabel efektivitas KPCS di Zimbabwe dengan mengacu pada indikator *output*, *outcome*, dan *impact* sebagaimana dikembangkan dalam teori Efektivitas Rezim oleh Underdal (2002).

Melalui pengumpulan data sekunder yang beragam ini, peneliti dapat melakukan verifikasi silang guna memastikan objektivitas temuan terkait implementasi kebijakan di wilayah Marange selama periode 2019–2024 (Sugiyono, 2017).

1.8.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui metode telaah pustaka (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang beragam, mencakup buku teks dalam bentuk fisik maupun elektronik, jurnal ilmiah, artikel berita dari media mainstream, serta laporan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi internasional yang relevan dengan topik efektivitas KPCS di Zimbabwe. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoretis dan data empiris yang valid guna mendukung proses analisis (Sugiyono, 2017).

Melalui telaah pustaka, peneliti secara sistematis menginventarisasi dokumen-dokumen kunci mengenai industri berlian di Marange pada periode 2019–2024, yang kemudian dikategorikan untuk mempermudah proses verifikasi dan perbandingan antar sumber. Pendekatan ini memastikan bahwa informasi yang digunakan sebagai basis argumentasi memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan mampu merepresentasikan dinamika interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam rezim internasional tersebut (Bhandari, 2020).

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik analisis data kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik data yang digunakan untuk menilai efektivitas kerja sama, yang berbentuk naskah bacaan atau data non-numerik. Selain itu, variabel-variabel konsep yang digunakan untuk mengukur efektivitas juga bersifat kualitatif, sehingga memerlukan interpretasi mendalam terhadap teks dan kebijakan (Bhandari, 2020). Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Penulis mengumpulkan seluruh data sekunder yang relevan terkait implementasi dan efektivitas Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) di Zimbabwe pada periode 2019–2024 dari berbagai sumber literatur.
2. Penulis menerapkan Teori Efektivitas Rezim yang dikemukakan oleh Underdal (2002) untuk membedah data yang telah dikumpulkan. Penulis memfokuskan analisis pada variabel dependen yang mencakup tiga aspek utama:
 - a. *Output*: Mengelompokkan data terkait peraturan dan kebijakan formal (seperti Diamond Policy 2019).
 - b. *Outcome*: Mengelompokkan data terkait perubahan perilaku aktor domestik dan tingkat kepatuhan di lapangan.

c. *Impact*: Mengelompokkan data terkait dampak nyata terhadap pengurangan perdagangan berlian ilegal dan stabilitas di wilayah Marange.

3. Setelah proses kategorisasi selesai, penulis melakukan tinjauan ulang dan sintesis terhadap hubungan antar-aspek tersebut. Penulis mengevaluasi apakah terdapat diskoneksi antara *output* kebijakan dengan *outcome* dan *impact* di lapangan guna menentukan tingkat efektivitas kerja sama tersebut secara keseluruhan (Miles et al., 2002).

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang secara konsisten berpijak pada kerangka kausalitas Teori Efektivitas Rezim dari Arild Underdal. Proses analisis dioperasionalkan dengan menelusuri hubungan sistematis antara variabel independen yang mencakup identifikasi karakteristik permasalahan (*problem malignancy*) di wilayah Marange serta kapasitas penyelesaian masalah (*problem-solving capacity*) melalui instrumen teknis KPCS terhadap variabel intervensi yang merepresentasikan dinamika tingkat kolaborasi antara pemerintah Zimbabwe dengan otoritas rezim internasional (Underdal, 2002).

Selanjutnya, data tersebut dikategorisasikan dan dievaluasi berdasarkan tiga dimensi variabel dependen guna mengukur efektivitas nyata rezim. Hal ini dilakukan melalui identifikasi *output* berupa regulasi formal seperti Zimbabwe National Diamond Policy 2019, penilaian

outcome yang merefleksikan perubahan perilaku aktor domestik seperti kepatuhan Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) dan aparat keamanan terhadap standar sertifikasi, serta pengukuran *impact* substantif terhadap penurunan perdagangan berlian ilegal serta perbaikan reputasi industri pertambangan nasional di pasar global (Miles et al., 2002). Interpretasi data dilakukan secara komprehensif dengan mengaitkan isi kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan, seraya mempertimbangkan konteks sosial-politik serta peran aktor negara maupun non-negara guna menjelaskan faktor-faktor pendorong atau penghambat efektivitas implementasi KPCS di Zimbabwe pada periode 2019–2024 (Underdal, 2002).

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif ini, kualitas data ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip dalam dua paradigma utama, yaitu interpretif (konstruktivis) dan kritis. Penggunaan paradigma ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penelitian tidak hanya valid secara metodologis, tetapi juga bermakna dalam memahami realitas sosial yang kompleks serta struktur kekuasaan yang melingkupinya (Bhandari, 2020).

Dalam paradigma interpretif (konstruktivis), kualitas data ditentukan oleh kredibilitas dan otentisitas pemahaman terhadap realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial. Kredibilitas dicapai dengan menyajikan narasi dan interpretasi yang mewakili berbagai sudut pandang aktor yang terlibat dalam implementasi Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) di

Zimbabwe, seperti pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan sektor industri. Sementara itu, otentisitas diperoleh melalui penyajian konteks sosial yang kaya dan deskriptif, yang mencerminkan persepsi, pengalaman, serta konstruksi makna yang dimiliki oleh para pelaku terhadap dinamika implementasi KPCS selama periode 2019–2024 (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini selaras dengan analisis variabel *outcome* dalam teori Underdal (2002), di mana perubahan perilaku aktor sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka menginterpretasikan aturan-aturan dalam rezim internasional tersebut.

Adapun dalam paradigma kritis, kualitas data diukur melalui analisis *historical situatedness*, yakni sejauh mana penelitian ini mempertimbangkan konteks sosial, historis, budaya, ekonomi, dan politik yang membentuk struktur serta dinamika implementasi KPCS di Zimbabwe. Data yang digunakan tidak hanya menggambarkan situasi terkini, tetapi juga menelusuri akar historis dari persoalan pengelolaan berlian konflik, keterlibatan aktor negara dalam penyimpangan tata kelola, serta relasi kekuasaan yang berperan dalam menciptakan atau mempertahankan praktik-praktik tersebut. Hal ini krusial untuk membedah bagaimana definisi formal "berlian konflik" yang digunakan secara global sering kali gagal menjangkau kekerasan struktural yang terlembagakan di tingkat domestik (Grant, 2012).

Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam dan reflektif terhadap efektivitas KPCS, sekaligus mengungkap kondisi

struktural dan relasional yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya dalam konteks Zimbabwe. Sinergi antara perspektif interpretif dan kritis ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melaporkan pencapaian *output* kebijakan, tetapi juga mengkritisi kegagalan pencapaian *outcome* dan *impact* akibat adanya benturan kepentingan antara norma internasional dengan realitas politik-ekonomi lokal (Miles et al., 2002; Underdal, 2002).